



KORAN	HAL
Haluan	12
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

## DPRD Limapuluh Kota Apresiasi Opini WTP

**LIMAPULUH KOTA, HALUAN**—DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menggelar rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2018 di Ruang Sidang DPRD, Bukik Limau, Sarilamak, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (21/6). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Demi Asra dan dihadiri oleh Bupati Limapuluh Kota diwakili Sekda Widya Putra, perwakilan Forkopimda, dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Limapuluh Kota.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri hanya segelintir wakil rakyat tersebut, setiap

juror bicara fraksi diberi kesempatan satu per satu untuk menyampaikan pandangannya. Secara umum, hampir semua fraksi mengapresiasi capaian Pemkab Limapuluh Kota atas perolehan opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun apresiasi terhadap capaian WTP tersebut, bukannya tanpa catatan.

Fraksi PPP melalui juror bicaranya Wirman Dt. Pangeran Nan Putih menegaskan, agar opini WTP diiringi dengan pelaksanaan dan penggunaan APBD yang berdampak luas bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. "Orientasi belanja daerah harus

diprioritaskan untuk masyarakat luas daripada kebutuhan birokrasi," ucapnya.

Senada dengan fraksi PPP, juror bicara fraksi Gerindra Irman Tedi menyampaikan apresiasi fraksinya terhadap perolehan WTP. Namun katanya, opini tersebut bukanlah tujuan utama melainkan harus diiringi dengan kinerja Pemkab untuk lebih baik lagi. Begitu juga dengan juror bicara fraksi PAN Yoserizal Dt. Parmato Alam, dia minta opini WTP jangan membuat Pemkab terlena.

"WTP bukan jaminan zero error. Di sisi lain masih ada tanggung jawab pemerintah terhadap tangisan para petani, pengangguran, serta masalah

sosial lainnya. Kami berharap, WTP yang diperoleh sejalan dengan pembangunan yang berkesinambungan. Jadi WTP, bukan Wajar Tanpa Pembangunan," ujarnya.

Selain mengomentari tentang opini WTP Pemkab, DPRD juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Limapuluh Kota. Dari data yang disampaikan juror bicara fraksi PKS dan PBB Yos Sariadi, PAD Limapuluh Kota pada 2018 dapat terealisasi sebesar 84,11%. "Kami mengapresiasi pencapaian PAD tersebut walaupun sebenarnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya sebesar 96,07%.

Semoga PAD yang ditargetkan pada 2019 ini dapat tercapai dengan baik dan maksimal," tuturnya.

Fraksi PPP, fraksi Gerindra, fraksi PAN, dan fraksi Demokrat mempertanyakan terjadinya penurunan PAD tersebut. Keempat fraksi tersebut meminta penurunan PAD dapat dievaluasi secara cermat. Sebagaimana yang disampaikan juror bicara fraksi Demokrat Wendi Dt. Marajo.

"Evaluasi apa penyebabnya PAD turun agar tidak terjadi lagi pada tahun mendatang. Kami minta Pemkab lebih giat menggali potensi-potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal," ucapnya. (mg-ari)